

Geopolitik dan Goestrategis Indonesia : Peranan Otonomi Daerah

Ihda Attika Asrina¹, Nurbaiti², Raniamira Kinasih Ahmad³

^{1,2,3} Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

e-mail: aattika62@gmail.com¹, nurbaiti121191@gmail.com²,
mirarania113@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran otonomi daerah dalam geostrategi dan geopolitik Indonesia di era modern. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Hal ini bisa menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan relevan dengan kondisi di lapangan. Namun, juga perlu diwaspadai agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah-daerah yang maju dengan yang tertinggal dalam hal pembangunan dan kesejahteraan.

Kata kunci : *Geostrategi, Geopolitik, Otonomi Daerah, Ketimpangan, Peran*

Abstract

This article discusses the role of regional autonomy in Indonesia's geostrategy and geopolitics in the modern era. Regional autonomy gives local governments the authority to manage local affairs according to the needs and characteristics of local communities. This can result in policies that are more responsive and relevant to the conditions on the ground. However, it is also necessary to guard against inequality between developed and underdeveloped regions in terms of development and welfare.

Keywords : *Geostrategy, Geopolitics, Regional, Autonomy, Inequality, Role.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, memiliki peran penting dalam geostrategi dan geopolitik global. Dengan luas wilayah yang besar dan populasi berkembang, Indonesia menjadi fokus aten internasional dalam hal keamanan, ekonomi, dan hubungan internasional. Salah satu aspek penting dalam memahami geostrategi dan geopolitik Indonesia adalah peran otonomi daerah dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan kemampuan negara di era modern.

Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara kekuatan politik dan faktor geografis yang mempengaruhi hubungan internasional. Konsep ini terutama membahas peran dan

posisi geografis suatu negara dalam menentukan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Faktor geografis yang dapat mempengaruhi geopolitik termasuk letak geografis, iklim, topografi, sumber daya alam, dan populasi. Studi geopolitik juga melibatkan analisis hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional, serta interaksi antara kekuatan politik dan faktor geografis di level global.

Sementara itu geostrategi adalah konsep yang serupa dengan geopolitik, namun lebih fokus pada aspek strategis dalam hubungan internasional. Geostrategi membahas peran dan strategi yang digunakan oleh suatu negara dalam menghadapi lingkungan strategis yang kompleks. Konsep ini melibatkan analisis strategi militer dan keamanan nasional, dan bagaimana faktor geografis dapat mempengaruhi strategi tersebut. Beberapa faktor geografis yang dapat mempengaruhi geostrategi termasuk lokasi, batas-batas geografis, akses ke sumber daya alam, dan ketersediaan jalur perdagangan.

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara "Eenheidstaat", yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kajian pustaka atau literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Otonomi Daerah Dalam Geopolitik Dan Geostrategi Indonesia

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam geopolitik dan geostrategi Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama:

a) Penguatan Ketahanan Nasional

Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional. Dengan desentralisasi, daerah dapat mengelola sumber daya dan potensi lokal dengan lebih efektif, yang membantu mengurangi ketergantungan pada pusat dan meningkatkan stabilitas nasional.

- b) **Pengelolaan Sumber Daya Alam**
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam mereka secara lebih efisien dan bertanggung jawab. Hal ini penting dalam konteks geopolitik, karena pengelolaan yang baik dapat mengurangi konflik dan ketegangan yang berkaitan dengan distribusi sumber daya.
- c) **Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah**
Dengan adanya otonomi, daerah dapat mengembangkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Ini memungkinkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas antara daerah yang lebih maju dan yang tertinggal. Ekonomi yang kuat di seluruh daerah memperkuat posisi geostrategis Indonesia sebagai negara yang stabil dan berkembang.
- d) **Pengelolaan Keamanan Lokal**
Otonomi daerah juga melibatkan pengelolaan aspek keamanan lokal. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah mereka, yang penting dalam konteks geostrategis untuk mencegah konflik lokal yang dapat bereskalasi menjadi ancaman nasional.
- e) **Diplomasi dan Kerjasama Antar Daerah**
Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk menjalin kerjasama langsung dengan daerah lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini dapat menciptakan jaringan diplomasi dan kerjasama yang kuat, memperkuat posisi geopolitik Indonesia di tingkat regional dan global.
- f) **Adaptasi Terhadap Tantangan Global**
Daerah dengan otonomi yang kuat lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan global, seperti perubahan iklim dan dinamika ekonomi global. Kemampuan untuk merespons secara lokal terhadap tantangan ini memperkuat posisi Indonesia secara keseluruhan di arena internasional.
- g) **Keberagaman dan Keutuhan Negara**
Otonomi daerah memungkinkan pengakuan dan pengelolaan keberagaman budaya, bahasa, dan etnis di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan negara dengan cara yang inklusif dan menghargai perbedaan, yang merupakan aspek penting dalam strategi geopolitik Indonesia.

Peranan otonomi daerah dalam geopolitik dan geostrategi Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari strategi nasional yang berfokus pada pengembangan wilayah dan keamanan. Otonomi daerah memungkinkan pemerintahan daerah untuk lebih aktif dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alamnya, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah. Dalam konteks geopolitik, otonomi daerah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan identitas wilayah, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman dan meningkatkan keamanan wilayah. Dalam konteks geostrategi, otonomi daerah dapat membantu meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan sumber daya alam dan meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan wilayah. Dengan demikian, otonomi daerah dapat menjadi bagian

penting dalam strategi geopolitik dan geostrategi Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan kemampuan wilayah.

Secara keseluruhan, otonomi daerah memainkan peran kunci dalam memperkuat posisi geopolitik dan geostrategi Indonesia. Dengan memberdayakan daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, menjaga keamanan lokal, dan berpartisipasi dalam diplomasi dan kerjasama, Indonesia dapat menciptakan stabilitas dan kemakmuran yang berkelanjutan, serta memperkuat posisinya di kancah internasional.

Peran Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta pelayanan publik dengan cara mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung.

Kesejahteraan merupakan hal yang sangat di inginkan oleh setiap individu, dan kesejahteraan di ciptakan agar setiap individu mampu untuk mengembangkan kualitas hidup mereka, tentunya hal ini perlu di dukung oleh peran lembaga negara khususnya pada masyarakat daerah. Karena pertumbuhan kualitas hidup di sebagian besar daerah di Indonesia tidak merata bahkan belum merasakan dampak dari kebijakan pemerintahnya itu, oleh karena itu sebagai negara demokrasi sudah sepantasnya kita mendapat hal yang adil dan merata. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk usaha yang bertujuan di sektor pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing antar daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini di harapkan dapat memaksimalkan lembaga pemerintah daerah masing-masing agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup dan kebahagiaan warga. Indikator kesejahteraan masyarakat meliputi:

- a. Pendapatan per kapita: Ukuran rata-rata pendapatan individu di suatu daerah, yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat.
- b. Tingkat pendidikan: Akses dan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan meningkatkan taraf hidup.
- c. Akses kesehatan: Ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan, yang penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas masyarakat.
- d. Kualitas hidup: Faktor-faktor seperti keamanan, lingkungan yang bersih, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta kepuasan hidup secara keseluruhan.

Dengan semua hal tersebut daerah dapat bersaing dengan daerah yang lain. selanjutnya daerah harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita Bineka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Kepala daerah yang inovatif mampu menggerakkan pemerintahannya tanpa harus selalu bertumpu kepada

pemerintah pusat, apalagi pada masa pandemi saat ini, dengan isu klasik yakni mengenai anggaran daerah seharusnya kepala bisa mengembangkan inovasi dan meningkatkan kreatifitas, terutama pada sektor ekonomi, dengan konsep pembangunan tidak harus terpaku dengan pendanaan dari pemerintah pusat tetapi hadir dari investor. UMKM, dan usaha besar lainnya yang ada di daerah tersebut.

a) Hubungan Otonomi Daerah dengan Kesejahteraan Masyarakat

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek penting dari hubungan ini meliputi:

- 1) Manajemen sumber daya lokal: Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat.
- 2) Peningkatan pelayanan publik: Otonomi daerah memungkinkan peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- 3) Inovasi kebijakan: Pemerintah daerah dapat mengembangkan program-program inovatif yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

b) Manfaat Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa manfaat utama dari otonomi daerah meliputi:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat: Dengan otonomi daerah, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
- 2) Percepatan pembangunan: Pemerintah daerah dapat lebih cepat dan responsif dalam menangani isu-isu lokal dan menerapkan solusi yang spesifik dan tepat sasaran.
- 3) Pengurangan ketimpangan: Otonomi daerah membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan memungkinkan daerah yang tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Otonomi daerah dapat menjadi salah satu instrument dalam peningkatan lajunya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, apabila pembangunan di daerah mengacu pada potensi daerah atau geografis, tata pemerintah, terutama yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah itu sendiri, dengan melaksanakan perinsip setandar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menjamin peningkatan mutu pelayanan masyarakat seecara merata sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik, pengembangan hidup demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan darah serta daerah antar daerah dalam menjaga keutuhan dan kesatuan republik Indonesia.

Konsep otonomi daerah diberlakukan sejak awal kemerdekaan dan pada masa kolonial Belanda titik pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut prinsip otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip yang dianut dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999:

- 1) Penyelenggaraan menitikberatkan pada aspek demokrasi keadilan pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2) Berdasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Diletakkan otonominya pada kabupaten dan daerah kota daerah.
- 4) Berdasarkan pada konstitusi.
- 5) Meningkatkan kemandirian daerah otonomi tidak ada wilayah administratif dalam daerah kabupaten dan daerah kota lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah.
- 6) Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah.
- 7) Pelaksanaan asas tugas pembantuan D mungkin kan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah tetapi juga dari pemerintah kepada daerah, tapi juga dari pemerintah dan daerah kepala desa.

Penerapan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dalam implementasinya termasuk undang-undang nomor 2 tahun 1999 terdapat permasalahan dalam pembangunan nasional Indonesia yang tidak dapat dihindari adanya jurang antara si kaya dan si miskin sehingga kesejahteraan yang diharapkan tidak dapat tercapai Hal ini karena akibat terbatasnya peraturan pelaksanaan sebagai juklak dan juknis serta akibat asas-asas otonomi daerah diabaikan dapat menghambat usaha pembangunan di daerah.

Regulasi yang mengatur tata penyelenggaraan. pemerintah daerah saat ini sebagai hukum positif adalah undang-undang nomor 32 tahun 2004 juncto nomor 3 tahun 2005 juncto UU Nomor nomor 8 tahun 2005 juncto UU nomor 8 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004, Pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi juga oleh faktor-faktor kemampuan si pelaksana kemampuan dalam keuangan ketersediaan alat dan bahan coma faktor potensi dan geografi dan kemampuan pelaksanaan otonomi daerah ini hanya meliputi pada prinsip demokrasi keadilan pemerataan dan keanekaragaman, sedangkan untuk politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama kewenangan urusan pemerintah yang tidak diberikan ke daerah. Prospek otonomi ke depan dapat dilakukan. dengan beberapa pendekatan yaitu dari aspek ideologi politik sosial budaya dan pertahanan keamanan. Aspek ideologi, mengandung falsafah bangsa yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara mengandung nilai-nilai pengakuan pada ketuhanan persatuan dan kesatuan terhadap hak asasi manusia, demokrasi keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat nilai- nilai ini dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (otonomi daerah) dapat diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara katagoris dan pengembangannya diatur dengan cara- cara tertentu pula. Kedua apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian

untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Keberadaan otonomi daerah dan pemerintah daerah otonom yang menentukan wewenang dan tugas DPRD provinsi berkaitan dengan tujuan negara Tujuan negara (bangsa) Indonesia adalah elemen (unsur) yang menentukan kehadiran organ-organ pemerintahan daerah seperti dewan perwakilan rakyat daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Pemerintah

Otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayah mereka. Berikut adalah beberapa dampak otonomi daerah terhadap kebijakan pemerintah:

- a) **Desentralisasi Keputusan**
Dengan otonomi daerah, keputusan yang sebelumnya ditentukan oleh pemerintah pusat kini dapat diambil oleh pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
- b) **Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas**
Pemerintah daerah dapat merespons permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat dengan lebih cepat dan tepat. Pengelolaan sumber daya yang lebih dekat dengan titik permasalahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
- c) **Peningkatan Partisipasi Publik**
Masyarakat lokal memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui mekanisme formal seperti Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) maupun melalui partisipasi langsung dalam pemerintahan daerah.
- d) **Diversifikasi Kebijakan**
Otonomi daerah mendorong munculnya berbagai kebijakan yang beragam sesuai dengan karakteristik, potensi, dan permasalahan masing-masing daerah. Hal ini dapat menghasilkan inovasi kebijakan yang tidak mungkin muncul dalam sistem yang sentralistik.
- e) **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi**
Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dari masyarakat dan lembaga perwakilan daerah menjadi lebih kuat.
- f) **Pembangunan yang Lebih Merata**
Otonomi daerah dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Daerah-daerah yang sebelumnya kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat dapat mengembangkan potensi lokal mereka sendiri dengan lebih optimal.

g) Tantangan dan Hambatan

Meski banyak manfaat, otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi lokal, kapasitas sumber daya manusia yang bervariasi antar daerah, dan kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerintah pusat tetap perlu berperan dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada pemerintah daerah.

h) Pengelolaan Konflik

Dalam beberapa kasus, otonomi daerah dapat membantu mengelola dan meredam potensi konflik sosial dan politik dengan memberikan ruang lebih bagi ekspresi identitas lokal dan kepentingan masyarakat setempat.

Otonomi daerah memiliki dampak besar terhadap kebijakan pemerintah karena memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Hal ini bisa menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan relevan dengan kondisi di lapangan. Namun, juga perlu diwaspadai agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah-daerah yang maju dengan yang tertinggal dalam hal pembangunan dan kesejahteraan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai macam pembagian dan unsur penyelenggaraan otonomi, serta setiap daerah otonom wajib menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah agar penyelenggaraan dapat berorientasi kepada tujuan yang sebenarnya yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam pembagian wewenang tersebut terdapat beberapa asas yakni, desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan yang dimana ketiga asas tersebut telah dilimpahkan kepada daerah otonom agar dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun kerja sama antar daerah. Namun pada dasarnya negara kita ini masih berprinsip dan menitik beratkan pada konsep sentralistik yang terpaku terhadap pemerintah pusat, yang dimana hal itu dapat berpengaruh dalam percepatan pembangunan daerah yang ada di Indonesia yang berakibat pelaksanaan konsep desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak efektif dan efisien.

Otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan berbagai contoh kasus yang mencerminkan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah. Berikut beberapa contoh nyata:

a) Pemekaran Daerah

Kasus Sulawesi Tenggara: Pemekaran wilayah menjadi beberapa kabupaten/kota baru seperti Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan. Dampaknya adalah peningkatan pelayanan publik karena pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, meskipun juga ada tantangan dalam hal pembiayaan dan infrastruktur.

b) Inovasi Kebijakan Daerah

Surabaya: Di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini, Surabaya menerapkan berbagai inovasi seperti taman kota, e-government, dan penanganan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat. Kebijakan ini meningkatkan kualitas hidup warga dan menjadikan Surabaya sebagai kota yang lebih ramah lingkungan.

c) Pengelolaan Anggaran Daerah

Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Bali: Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan BLT bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, dengan prosedur yang disesuaikan

dengan kondisi lokal, sehingga penyaluran bantuan lebih cepat dan tepat sasaran dibandingkan dengan bantuan dari pusat yang sering kali terhambat prosedur birokrasi.

d) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Jembrana: Di Bali, Jembrana terkenal dengan program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) yang menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi warganya. Kebijakan ini menjadi contoh keberhasilan desentralisasi di bidang kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

e) Pengembangan Pariwisata Lokal

Kabupaten Banyuwangi: Di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi mengalami transformasi besar di sektor pariwisata melalui festival-festival budaya, perbaikan infrastruktur pariwisata, dan promosi destinasi wisata lokal. Kebijakan ini berhasil meningkatkan jumlah wisatawan dan pendapatan daerah.

f) Penanggulangan Kemiskinan

Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan koperasi. Program-program ini meliputi pelatihan, bantuan modal, dan pemasaran produk yang membantu mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

g) Pemberantasan Korupsi di Tingkat Lokal

Aceh: Implementasi Qanun (peraturan daerah) di Aceh yang mengatur tentang pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Kebijakan ini membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

h) Pengelolaan Konflik Sosial

Papua: Pemerintah daerah Papua memiliki kewenangan khusus untuk mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Meski ada tantangan dalam pengelolaan dana ini, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpuasan dan konflik sosial di wilayah tersebut.

Papua merupakan provinsi yang memiliki banyak sumber daya alam, seperti emas, timah, dan minyak bumi. Dalam konteks geopolitik dan geostrategi Indonesia, pengembangan otonomi daerah di Papua menjadi penting untuk mencapai tujuan pemerintah. Dengan memperkuat otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dapat lebih mengarahkan pengelolaan sumber daya alam lokal dan membangun ekonomi yang lebih lokal.

Hal tersebut juga dapat memperkuat posisi geopolitik Indonesia di Asia Tenggara dan memperbaiki hubungan antara masyarakat Papua dengan pemerintahan nasional. Pengembangan otonomi daerah yang terjadi di Papua juga dapat memperkuat hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara yang menghargai perlunya pengembangan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. pengembangan otonomi daerah di Papua juga dapat memberikan pemahaman tentang peranan pemerintah nasional dalam mendukung otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

SIMPULAN

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam geostrategi dan geopolitik Indonesia di era modern. Dengan memperkuat otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih mengarahkan pengelolaan sumber daya alam lokal dan membangun ekonomi yang lebih lokal. Hal tersebut juga dapat memperkuat posisi geopolitik Indonesia di Asia Tenggara dan memperbaiki hubungan antara masyarakat Papua dengan pemerintahan nasional. Pengembangan otonomi daerah yang terjadi di Papua juga dapat memperkuat hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara yang menghargai perlunya pengembangan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah membawa banyak manfaat dalam hal peningkatan responsivitas dan relevansi kebijakan pemerintah, namun juga memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Terkini. (2023, March 10). Pengertian Serta Perbedaan Geopolitik dan Geostrategi. Retrieved April 22, 2024, from kumparan website: <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-serta-perbedaan-geopolitik-dan-geostrategi-1zz8xY8nkb5>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- dari, K. (2010, June 30). artikel daftar Wikimedia. Retrieved April 22, 2024, from Wikipedia.org website: https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia
- Fadhillah, M. N., & Marliyah, M. (2022). Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2538-2542.
- Khalimi, K. (2021). Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda). *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 4(2), 1-20.
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56-70.
- Nababan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2021). Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal Of Law and Policy Transformation*, 6(2), 108-116.
- None Lintang Prabowo, & None M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten/Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Empiris di Indonesia oleh Yuswanto dan L. Harijanti. (Tahun terbit: 2020)
- Otonomi Daerah dan Transparansi Pemerintah di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat oleh Rina Febriani dan Dedi Kurniawan. (Jurnal: "Jurnal Ilmu Pemerintahan", Tahun terbit: 2021)
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 26-39.

- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20-28.
- PRABOWO, Lintang; RAFLI, M. Tenku. Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2020, 2.2: 20-28.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 184-196.
- Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. (2023). Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global. Indonesia Emas Group.